
Strategi Pemerintah Kota Bitung Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Matuari (Studi Di Dinas Pengendalian Dan Keluarga Berencana Kota Bitung)

Oleh:
Gladies N.F. Gerits¹
Sarah Sambiran²
Stefanus Sampe³

Abstrak

Salah satu permasalahan kehidupan masyarakat adalah masalah kependudukan dimana semakin bertambahnya penduduk itu juga merupakan berkat dan permasalahan yang ada Program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam mensukseskan pembangunan di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah apa strategi pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk Kota Bitung di kecamatan Matuari, melalui pendekatan kualitatif. Pada aspek Perencanaan dalam pengendalian jumlah penduduk; Melakukan kegiatan perencanaan kegiatan pengendalian penduduk dengan mengikuti dan menjabarkan program Keluarga Berencana baik dari pusat. Melakukan Sinergitas yang dapat menuntaskan kegiatan pengendalian pendudu di Kota Bitung. Pada aspek Tindakan dengan berbagai program pengendalian penduduk dengan melaksanakan program Keluarga berencana. Agar supaya dinas pengendalian penduduk lebih sinergitas bersama satuan kerja perangkat daerah lainnya dalam membuat kebijakan tentang pengendalian penduduk di Kota Bitung yang tegas, humanis dan manusiawi. Pada aspek Tindakan yang dilakukan: berkolaborasi, tindakan yang sinergitas dari dinas pengendalian penduduk dengan instansi lainnya dan masyarakat dalam pemantauan dan penindakan kepada warga pendatang.

Kata Kunci : Startegi Pemerintah, Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, Kota Bitung

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini dengan perkembangan yang ada salah satu permasalahan kehidupan masyarakat adalah masalah kependudukan dimana semakin bertambahnya penduduk itu juga merupakan berkat dan permasalahan yang ada Program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam mensukseskan pembangunan di Indonesia. Semakin besar jumlah penduduk, maka biaya pembangunan akan semakin tinggi, misalnya untuk subsidi pangan, pendidikan, bahan bakar dan juga subsidi kesehatan. Oleh karena itu pemerintah menggalakkan program KB (keluarga berencana) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Dalam prakteknya, program kependudukan dan keluarga berencana dilancarkan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat seperti iklan layanan masyarakat, dilanjutkan ke tingkat provinsi, kabupaten, desa – desa, hingga setiap rumah atau kepala keluarga yang bersentuhan langsung oleh masyarakat. Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Pusat Dr Sugiri Syarief, MPA dalam acara Gutek (Gubernur Temu Kader) yang diterbitkan dalam situs resmi BKKBN mengatakan, tantangan baru di dalam pengendalian penduduk tidak hanya hanya sebatas hanya mengendalikan angka kelahiran saja, tetapi juga mencakup penurunan angka kematian (kematian bayi dan ibu waktu melahirkan) masih cenderung meningkat.¹¹

<http://mediacenter.malangkota.go.id/tag/pakde-karwo/>, diakses pada tanggal 7 November 2018 Hal ini menunjukkan bahwa program keluarga berencana tak hanya

sebatas penyebaran alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, tetapi juga segala hal berkaitan kesehatan reproduksi, ibu hamil, melahirkan dan bayi Migrasi/perpindahan penduduk. KB Dalam situs media online ANTARA, Sugiri Syarief juga mengatakan bahwa pada tahun 1800, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 18 juta jiwa dan bertambah pada tahun 1900 menjadi 40 juta jiwa dan jumlahnya menjadi 205 juta jiwa pada tahun 2000. Angka tersebut ternyata lebih rendah dibanding prediksi para ahli bahwa penduduk Indonesia akan mencapai 285 juta jiwa pada tahun 2000. Namun tetap saja ini merupakan angka yang cukup tinggi, mengingat makin padatnya perumahan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, program KB harus terus dimaksimalkan agar angka kelahiran, kematian ibu dan juga bayi dapat ditekan lagi. Bila melihat angka populasi seperti diatas, nampaknya penggalakan KB selama ini belum bisa dikatakan berhasil, namun perlu kita ketahui bagaimana sebenarnya program KB ini dapat menyentuh masyarakat hingga yang paling primitif sekalipun. Faktanya, para petugas kesehatan di desa-desa atau disebut bidan desa juga belum bisa menangani seluruh masyarakat. Ini disebabkan karena jumlah tenaga kesehatan berpendidikan yang terbatas. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk membangun kesadaran akan kesehatannya sendiri. Melihat fenomena diatas maka BKKBN membentuk program kader dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dan warga sekitar di bidang kesehatan.

Kader dapat dikatakan pula sebagai pasukan lini bawah yang

terjun langsung ke rumah-rumah untuk membantu anggota keluarga mengatasi masalah kesehatan. Ada banyak hal yang disampaikan oleh kader, misalnya tentang pentingnya ber-KB bagi kesejahteraan keluarga, kesehatan remaja, balita, juga para lansia. Kader kesehatan yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat sekitarnya ini akan bertugas secara sukarela membantu pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Mereka lebih potensial dalam mempengaruhi lingkungannya jika dibandingkan dengan iklan atau petugas kesehatan dari luar daerah. Kader lebih mampu menyampaikan pesan – pesan kesehatan secara sempurna kepada masyarakat, karena merekalah yang lebih mengenal kultur masyarakat sekitarnya.³ Untuk membujuk masyarakat dalam upaya pembangunan di bidang kesehatan ini memang tidak bisa hanya dilakukan melalui proses edukatif, karena tidak semua masyarakat mampu mencerna pesan yang disampaikan oleh pegawai kesehatan. Akan lebih cocok apabila pendekatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat. Dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh kader kesehatan. Kader juga tak sepenuhnya bertanggung jawab dalam hal ini, karena mereka bukan tenaga profesional. Mereka adalah orang yang membantu ³ <http://dr-suparyanto.blogspot.com/>, diakses pada 7 November 2019 ⁴ penyampaian sosialisasi kesehatan yang siap datang ke tiap rumah. Namun, untuk memperlancar kegiatan tersebut, maka sebaiknya kader dibekali oleh pengetahuan pengetahuan yang cukup tentang kesehatan, misalnya tentang manfaat dan jenis-jenis KB, kesehatan reproduksi, nilai gizi, penyakit menular

seksual hingga kiat pacaran sehat yang mampu menekan jumlah pernikahan usia muda. Dalam proses sosialisasi antara kader dengan masyarakat, tentunya akan terjadi komunikasi antarpribadi. Oleh karena itu, selain dibekali ilmu dasar kesehatan, mereka juga perlu memiliki communication skill sehingga mampu mempengaruhi individu lain agar dapat membuat keputusan yang tepat demi kesehatan mereka.

Diera globalisasi ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk di Negara berkembang sangat berdampak pada peningkatan angka pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan mengakibatkan resiko kemiskinan yang tinggi, negara yang laju pertumbuhan penduduknya memiliki peraturan yang menekan jumlah angka kelahiran, peraturan ini diharapkan agar bisa memperlambat angka kelahiran yang tidak terkontrol. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangny struktur umur penduduk di beberapa daerah menjadi masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana tingkat pertumbuhan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama mengumpulkan data hingga penelitian ini berakhir dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan. Selanjutnya penafsiran data dilakukan sesuai dengan tujuan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan sesuai tujuan penelitian.

Pada Penelitian terdahulu dengan judul” strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam

pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di kota mataram” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sudah berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi atau program yang dilaksanakan. Strategi yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu 1. Analisis The Growth Strategy, Program yang dilakukan yaitu kegiatan Pembentukan dan Peresmian Kampung Keluarga Berencana, 2. Analisis The Welfare Strategy, Program yang dilakukan yaitu menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka penyuluhan dan pergerakan keluarga Berencana dan melakukan pelayanan menggunakan mobil pelayanan KB, 3. Analisis The Responsitive Strategy, Program yang dilakukanyaitu sosialisasi penggerakan masyarakat peduli KB berkualitas, 4. Analisis The Integrated and Holistic Strategy, Program yang dilakukan yaitu kegiatan Pembinaan Kader KB se Kota Mataram. Dari 4 strategi diatas maka yang sangat relevan untuk laju pertumbuhan penduduk yaitu analisis the Growth Strategy. Faktor pendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram yaitu dengan adanya undang-undang dan peraturan walikota Mataram yang bisa menjadi pendorong dalam berjalannya setiap program yang telah dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedangkan faktor penghambatnya yaitu dengan banyaknya masalah dan hal-hal yang bisa menghambat kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk Kota Mataram.

Pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu kelahiran kematian dan migrasi dan mencermati persoalan penduduk Di Kota Bitung perkembangan penduduk terus bertambah hal ini terus terlihat dengan banyaknya penduduk yang migrasi/berpindah dengan berurbanisasi di Kota Bitung sebagai pusat industry di kawasan Timur Indonesia, hal ini tentunya tidak mengelak dengan terjadinya kedatangan penduduk daridesa di seputaran Propinsi sulawesi Utara dan sekitarnya untuk mengadu nasib di Kota Bitung yang terkenal sebagai kota Cakalang yang juga sebagai kota yang terkenal dengan industry perikanan sehingga menjadi menarik di kalangan pekerja untuk mengadu nasib mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan perikanan maupun perusahaan yang lain yang membuka perusahaan, di Kota Bitung dan hal ini tentunya mengakibatkan semakin banyaknya orang untuk datang di Kota Bitung tanpa pembatasan yang adda, selain itu juga paling banyak pekerja yang datang adalah dalam usia yang produktif, yang secara alamiah akan terjadi pertemuan dengan lawan jenis dalam aktivitasnya di kota Bitung sehingga terjadi perkawinan dan menyumbang angka kelahiran bagi penduduk pendatang sehingga jumlah penduduk dari tahun –ke tahun terus meningkat dan daya tampung rumah tinggal menjadi padat tidak tertampung sehinggaga efeknya, adanya pemukiman-pemukiman liar yang ada di kota Bitung yang paling banyak di daerah penggiran pantai, hal ini tentunya menimbulkan

permasalahan dan keresahan di kalangan masyarakat karena dengan tingkat hunian yang padat sehingga tidak mengherankan aksi pencurian di kota Bitung sangat tinggi, dan kendaraan bermotor, pencurian barang rumah yang berharga, sampai bunga juga sering terjadi pencurian oleh dan sebab itu mengakibatkan ketidaknyamanan orang yang hidup dan tinggal di kota Bitung oleh karena pemerintah perlu ada strategi untuk mengendalikan jumlah penduduk,

Oleh karena itu pemerintah daerah Kota Bitung perlu adanya strategi dalam rangka mengendalikan jumlah penduduk yang ada di Kota Bitung terutama di kecamatan Matuari yang jumlah penduduknya yang padat, dan paling banyak di Kota Bitung, mengingat juga bahwa kecamatan MATuari adalah Kawasan KEK dan pusat industry di Kota Biung sehingga upaya ini strategi pengendalian ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan social kehidupan masyarakat oleh karena itu menjadi ketertarikan saya untuk mengkaji judul penelitian ini.

Sehubungan dengan uraian latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Apa Strategi pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk Kota Bitung di kecamatan Matuari. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : Manfaat Teoritis penelitian untuk pengembangan ilmu pemerintahan dan memperkaya konsep tentang Strategi pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk Kota Bitung di kecamatan Bitung Matuari. Manfaat praktis penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah desa dalam hal

Strategi pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk Kota Bitung di kecamatan Bitung Matuari.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi Pemerintah

Strategi Pemerintah Strategi bisa dikatakan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bintaro (dalam Rusdiananingtyas, 2006: 1899) mengartikan bahwa strategi sebagai keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan pasti, guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan, dimana dalam strategi itu terdapat metode dan teknik. Strategi mencerminkan kesadaran organisasi mengenai bagaimana, kapan, dan dimana ia harus bersaing; melawan siapa; dan untuk maksud apa. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing (Hamim, 2009: 73).

Strategi secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu proses rencana pimpinan pucuk yang befokus pada tujuan jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut di capai. Dan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai tindakan yang bersifat ingkramental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di massa depan (Ruung, 2014). Selain itu, stretegi juga bisa dikatakan sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang dilakukan oleh pemerintah (Mahfudz, 2015: 5).

Pengendalian penduduk

Pengendalian Menurut Mulyadi

(2007:89) Pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:70) pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen. Menurut Harahap (2011:89) Pengendalian merupakan suatu tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan (korektif). Berdasarkan uraian di atas bisa di tarik kesimpulan bahwa pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yg dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua bisa berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Penduduk Menurut UUD 1945 Pasal 26 ayat 2 Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan

pembangunan berkelanjutan.

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Peran DPPKB dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (M. Fitra Admaja) 987 Jadi dari uraian diatas bisa diambil penjelasan bahwa penduduk merupakan orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berintraksi satu sama lain secara terus menerus Pertumbuhan Penduduk Menurut Mulyadi Subri (2003:16), pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu : kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk, dan migrasi keluar. Sedangkan menurut Noveria Mita (2011: 5)

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah/ukuran (size) penduduk yang terjadi akibat berlangsungnya peristiwa kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Untuk tingkat global (dunia), pertumbuhan penduduk hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh dua peristiwa kependudukan tersebut dikenal dengan pertumbuhan penduduk alami. Pada lingkup yang lebih kecil,

misalnya ditingkat negara, pertumbuhan penduduk dipengaruhi pula oleh imigrasi penduduk ke luar dari suatu Negara. Disebutkan pula pada Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Jadi berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Perubahan jumlah/ukuran (size) penduduk yang terjadi akibat berlangsungnya peristiwa kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Sehingga, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan

ketahanan nasional

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Daerah Kota Bitung, dalam hal ini di kecamatan Matuari Alasan peneliti memilih lokasi penelitian, bahwa di Kota Bitung ini di kecamatan Matuari ini merupakan suatu wilayah kecamatan yang ada di Kota Bitung yang paling banyak dari data yang ada, selain itu merupakan tempat tinggal peneliti sendiri sehingga memudahkan dalam proses pengabilan data dan pemilihan informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut John W. Creswell (2010:4-5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode mengeksplorasi dan memahami *makna* yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan Tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian

melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Wiratna Sujarweni (2014:33) Untuk lebih mengakuratkan data-data penelitian, penulis juga menggunakan studi dokumen yang berbentuk gambar-gambar atau catatan-catatan terakhir yang ada pada lokasi penelitian. Data dan dokumentasi yang diperoleh dilapangan tentang judul yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Proses Rencana Pimpinan Dalam Pengendalian Jumlah Penduduk

Perencanaan merupakan persiapan yang disusun dengan menggunakan segenap kemampuan penalaran bagi suatu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan proses yang esensial dalam strategi pemerintahan. Perencanaan mencakup hal yang luas, kompleks, serta memerlukan banyak waktu. Inti dari perencanaan berupa perumusan tujuan dan pengkoordinasian cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan memiliki dua arti penting. Pertama dan yang utama adalah sebagai pijakan (titik awal) dari keseluruhan proses manajemen. Kedua, berfungsi mengarahkan segenap aktivitas dalam organisasi. Secara lebih spesifik, pentingnya perencanaan didasarkan pada kenyataan yaitu Keberhasilan organisasi dan keefektifan strategi sangat ditentukan oleh keberhasilan perencanaan, Perencanaan memfokuskan pada tujuan yang hendak dicapai, Perencanaan membantu menghadapi ketidakpastian dan mengantisipasi permasalahan, Perencanaan memberikan arah bagi pengambilan

keputusan, Perencanaan diperlukan sebagai dasar monitoring dan pengawasan sehingga akan lebih cermat Pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan sasaran yang diharapkan dalam pengendalian penduduk di Kota Bitung. Kedudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bitung adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kependudukan dan KB dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kota Bitung. Setelah tersusun visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, melalui penilaian faktor Internal dan Eksternal atau dikenal dengan Analisis SWOT.

Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan kompleksitas permasalahan Badan Kependudukan dan KB Kota Bitung sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang dimana Langkah tersebut dilihat dulu dari Program Pemerintah pusat dan daerah provinsi untuk dijabarkan dalam rumusan strategi kijajakan daerah berupa rencana strategis daerah yang dalam hal ini adalah Dinas pengendalian penduduk sebagai Lembaga pelaksana kebijakan pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bitung.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi Bappeda. Rumusan program yang dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kebijaksanaan, yang dijabarkan ke dalam rumusan program yang tepat.

Rumusan program yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kebijaksanaan dirumuskan oleh DPPKB Kota Bitung sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Perencanaan Strategis adalah seni dan ilmu untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Dilihat dari sisi waktu perencanaan Jangka panjang waktunya 20 – 30 tahun, perencanaan jangka menengah waktunya 3 – 5 tahun, sedangkan perencanaan jangka Pendek kurun waktunya paling lama satu tahun. Strategi penyusunan dapat ditempuh melalui tim kecil penyusunan renstra, dalam menyusun kerangka pikir renstra harus selalu memperhitungkan visi, misi, tupoksi lembaga/unit kerja dan kebijakan pimpinan. Pendekatan dalam membuat perencanaan strategis sebuah organisasi melalui pendekatan, Atas - Bawah, Bawah - Atas dan campuran oleh karena itu keterlibatan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bitung perlu melibatkan satuan kerja perangkat daerah yang lain dalam menelaah kebijakan dan keputusan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam keterpaduan arah dan pandangan

dalam perencanaan strategis untuk dilaksanakan di Kota Bitung dengan program - program yang searah dan selaras bukan menghasilkan program kerja yang tumpang tindih atau tidak sinergitas sehingga tidak terarah dalam pelaksanaan program yang ujung=ujung double dalam pembiayaan sehingga tidak mendapatkan manfaatnya. sebagaimana yang tercantum dalam tupoksi dinas pada Bidang Pengendalian jumlah penduduk maka bertugas untuk :

- a. Penyiapan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan teknis dilingkup pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- b. Penyiapan pelaksanaan pengumpulan data melalui sistem informasi, aplikasi dan dokumentasi serta penyebarluasan informasi yang sudah tervalidasi dilingkup pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c. Pemberian pembimbing teknis dan fasilitasi serta pemanduan dan sinkronisasi kebijakan dilingkup pengendalian penduduk dan informasi keluarga

Menurut Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Di samping itu di sebutkan pula perkembangan kependudukan dan pembanguna keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan

mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Peranan pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Akan didasarkan pada kaitan indikator peranan pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan indikator pertumbuhan penduduk itu sendiri.

Bahwa dalam rangka tugas untuk pengendalian penduduk perlu adanya sinergitas dalam penyusunan berbagai program kegiatan antara Dinas pengendalian jumlah penduduk dan keluarga Berencana sebagai pioneer kegiatan kerja dalam pengendalian jumlah penduduk Bersama dengan Satuan kerja perangkat daerah lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Pemerintah kecamatan, Pemerintah kelurahan yang ada di Pemerintah Kota Bitung.

Tindakan yang dilakukan dalam pengendalian jumlah penduduk

Jadi satrategi program pengendalian jumlah penduduk yang dilakukan pemerintah kota Bitung adalah

- 1 melakukan program KB dan peningkatan kesejahteraan keluarga
- 2 Melaksanakan program peningkatan kesejahteraan keluarga
- 3 Melaksanakan pemantauan orang yang melakukan urbanisasi

Strategi Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Bitung, dilaksanakan sesuai dengan data yang diperoleh, dengan penerapan program Keluarga Berencana (KB). Secara nasional, Kebijakan yang

diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi masalah jumlah penduduk, yaitu Menganangkan program Keluarga Berencana (KB) dengan melakukan pemasangan baliho-baliho di jalan-jaln dan kantor pemerintah dengan menghimbau tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) diatas 17 tahun keatas , pengaturan kelahiran dengan menghimbau jarak untuk memperoleh anak dengan jangka waktu sesuai dengan anjuran Kesehatan dengan adanya jarak 3-4 tahun, mealkukan pembinaan ketahanankeluarga dengan melakukan sosialisasi - sosialisasi bahkan pelatihan-pelatihan, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Pencanangan program KB secara nasional dilakukan dengan cara memperkenalkan tujuan-tujuan program KB melalui jalur pendidikan, mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak. Di Kota Bitung, kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui program keluarga berencana. Dalam RPJMD kota Bitung 2020. Salah satu unsur penting yang ditekankan di sana adalah Starategi untuk Membangun Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan sasarannya adalah Program dan kegiatan Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Remaja, Gender mainstreaming dilanjutkan dan ditingkatkan.

Kebijakan ini dilakukan dengan cara: 1. Menjamin ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan program bagi seluruh peserta KB, 4 khususnya dalam pemberian kontrasepsi gratis bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 atau keluarga

miskin lainnya serta peningkatan kesertaan KB pria; 2. Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dalam merencanakan kehamilan serta meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak untuk mewujudkan keluarga sehat dengan anak ideal; 3. Pembinaan KIE program KB dan meningkatkan pengetahuan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Manado; 4. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan perkembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bagi anak dan remaja serta pembinaan lingkungan keluarga secara terpadu melalui posyandu kelompok kegiatan bina keluarga; 5. Pengoptimalan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan untuk meneguhkan program kegiatan kepada masyarakat; dan 6; Pemberian kualitas dan kuantitas SDM di lini lapangan dan kualitas manajemen pengelolaan program KB dan Pemberdayaan Perempuan.

Pemerintah Kota Bitung dalam menangani arus urbanisasi khususnya dalam mengendalikan penduduk pendatang di Kota Bitung melakukan strategi dengan Pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk mendata bagi para pendatang untuk menyampaikan wajib lapor kepada pemerintah terdekat hal ini dilakukan agar supaya dapat mengecek keberadaan dan status daripada penduduk pendatang tersebut sehingga dapat menghindari permasalahan social kemasyarakatan yang ada di kemudian hari, Langkah juga selanjutnya adalah dari pihak dinas pengendalian penduduk dan keluargaberencana dan juga Bersama

satuan kerja perangkat daerah lainnya setiap bulan melakukan sidak di tempat Kos-kosan yang sering ditingali oleh penduduk pendatang atau mengecek warga pendatang di rumah-rumah penduduk untuk mengecek atatus dan keberadaanya, memang sering didapati di tempat kos sering menjadi tempat penampungan sementara bagi penduduk pendatang karena merupakan kolega atau teman satu kampung, sehingga menambah jumlah penghuni yang ada kemudian juga ditemukan ada status tidak jelas dan malahan ada yang hidup kumpul kebo, dan tidakan yang dilakukan dengan memberikan himbauan agar supaya mereka dapat menyelesaikan status kependudukan mereka, dan Tindakan paksaan lainnya seperti memulangkan penduduk yang tidak jelas keberadaanya di Kota Bitung ini belum ada aturan yang mengaturnya sehingga Dinas tidak dapat mengambil keputusan yang lebih tegas misalnya memulangkan mereka atau menyuruh meninggalkan Kota Bitung oleh dan sebab itu perlu ada strategi kebijakan pemerintah Kota Bitung dalam rangka mengatasi penduduk pendatang yang ada di Kota Bitung agar supaya tidak menimbulkan permasalahan kependudukan dan soial di tengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada aspek Perencanaan dalam pengendalian jumlah penduduk; Melakukan kegiatan perencanaan kegiatan pengendalian penduduk dengan mengikuti dan menjabarkan program Keluarga Berencana baik dari pusat, Provinsi dalam bentuk rencana strategis Dinas Pengendalian dan keluarga Berencana Kota. Melakukan Sinergitas dengan memadukan kajian-

kajian Bersama Satuan kerja perangkat daerah lainnya dalam merumuskan Langkah-langka yang strategis untuk menghasilkan kebijakan -kebijakan yang dapat mengarah kepada satu keterpaduan aturan yang dapat menuntaskan kegiatan pengendalian pendudu di Kota Bitung

Pada aspek Tindakan yang dilakukan dalam pengendalian jumlah penduduk. Melakukan berbagai program pengendalian penduduk dengan melaksanakan program Keluarga berencana, membagikan alat kotrasepsi gratis pada penduduk kurang mampu. Memberikan Pelatihan pengetahuan penggunaan alat kotrasepsi bagi Pasangan usia subur dan produktif. Melakukan pemantauan bagi orang yang datang di Bitung dengan melakukan wajib lapor bagi mereka yang datang untuk mencari pekerjaan. Melakukan pengecekan dan inspeksi kepada warga pendatang.

Agar supaya lebih mengintensifkan berbagai program keluarga berencana agar supaya lebih sinergitas dan program lebih mengarah kepada peningkatan penggunaan kegiatan keluarga berencana dan menupayakan kegitan-kegiatan yang memberikan kemandirian dalam keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga dalam pemenuhan kehidupan kebutuhan pokok dan sekunder masyarakat.

Agar supaya dinas pengendalian penduduk lebih sinergitas Bersama satuan kerja perangkat daerah lainnya dalam membuat kebijakan tentang pengendalian penduduk di Kota Bitung yang tegas, humanis dan manusiawi.

Pada aspek Tindakan yang dilakukan: Dinas pengendalian dalam

pelaksanaan tugas perlu sinergitas denagan instansi, dinas atau satuan kerja perangkat pemerintah lainnya agar supaya berkolaborasi dalam penanganan pengendalian jumlah penduduk di kota Bitung. Perlu ada Langkah Tindakan yang sinergitas dari dinas penegendalian penduduk dengan instansi lainnya dan masyarakat dalam pemantauan dan penindakan kepada warga pendatang yang ada di Kota Bitung dalam mencari pekerjaan dan penghidupan di Kota Bitung sehingga tidak menjadi warga pendatang yang menjadi pengangguran yang menambah permasalahan social kependudukan di kota Bitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Barclay, George W. 1984. Teknik Analisa Data Kependudukan. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- David, Fred R. 2008. Strategic Management: Management Strategis Konsep. 12 edition. Jakarta: Salemba Empat
- Faqih, Achmad. 2002. Kependudukan-Teori Fakta dan Masalah. Yogyakarta: De Publish.
- Irianto, Agus and Friyatmi. 2016. Demografi dan Kependudukan. Jakarta: Kencana.
- Malthus, et al. 2007. Kependudukan Dilema dan Solusi. Bandung: Nuansa. Moleong, L, J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prawiro, Ruslan H. 1983. Kependudukan Teori Fakta dan Masalah. Bandung: Alumni.
- Saryono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.

- Alfabeta.
- Simanjuntak, P, N.H. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Stoner, Freeman and Gilbert J.R. 1995. Manajemen. Jakarta: Mitra Utama.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta. . 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Cetakan Ke-20. Bandung:
- Intansaf 20 “Permasalahan Kependudukan Di Indonesia” Minahasa Selatan Jurnal administrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten). publik. Mataram Kota “Proyeksi jumlah penduduk kota mataram tahun 2011-2020” dari [<https://mataramkota.bps.go.id/>] Di akses pada tanggal 25 November 2018.
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 72/PER/B5/2011 tentang organisasi dan tata kerja BKKBN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Syawal, R. 2012. Analisis peran pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk (studi tentang peranan dan fungsi BKBPP dalam meminimalisir pertumbuhan penduduk di Kec. Enrekang Kab. Enrekang). Jurnal ilmu Pemerintahan.
- Tatuhe, S., Laloma. A., and Pesoth, W, F. 2016. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Kawulur, A., Dengo, S., and Rompas, S.P.I. 2015. Peran BKKBN dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana Talud). Jurnal Administrasi Publik.

SUMBER LAINNYA:

- Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.
- Sumber lain Artikel /Modul/Diktat. [<https://www.suarantb.com/ga ya.hidup/kesehatan/2017/10/247580>] Di akses pada tanggal 25 November 2018. [<https://gudangmakalah.blogspot.com/2012/10/skripsianalisis-peran-pemerintah-dalam.html>] Diakses pada tanggal 18 desember 2018.